



STRATEGI *PAIKETAN KRAMA ISTRI* (PAKIS) DALAM MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN ADAT BALI

I Gusti Ayu Putu Ika Surya Maharani ¹⁾, Piers Andreas Noak ²⁾, Kadek Dwita Apriani ³⁾

^{1,2,3)} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana, Jalan PB. Sudirman, Denpasar, Bali 80232

Email: ikasurya333@gmail.com¹, piersandreeasnoak@unud.ac.id², kadek.dwita88@unud.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan mengkaji secara mendalam strategi yang diterapkan oleh *Paiketan Krama Istri* (PAKIS) Provinsi Bali dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan adat di Bali. Latar belakang penelitian ini adalah ketimpangan gender yang dipengaruhi oleh budaya patriarki yang mendominasi kehidupan sosial di Bali. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk mengeksplorasi bagaimana PAKIS Bali merancang dan melaksanakan program-program yang bertujuan meningkatkan peran dan posisi perempuan dalam masyarakat adat Bali. Dengan menggunakan Teori Feminisme Liberal, hasil penelitian menunjukkan bahwa PAKIS Bali, melalui berbagai inisiatif seperti pendidikan, pelatihan, dan advokasi, telah berhasil memperkuat partisipasi perempuan dalam bidang-bidang yang sebelumnya didominasi oleh laki-laki. PAKIS Bali juga telah mampu mengatasi sebagian tantangan yang terkait dengan norma-norma tradisional yang membatasi peran perempuan. Kesimpulannya, strategi PAKIS Bali tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan keterlibatan perempuan dalam aspek-aspek sosial, budaya, dan ekonomi, tetapi juga membentuk landasan untuk transformasi yang lebih luas menuju kesetaraan gender di Bali.

Sejarah Artikel

Submitted: 1 Agustus 2024

Accepted: 3 Agustus 2024

Published: 10 Agustus 2024

Kata Kunci

Paiketan Krama Istri, Pemberdayaan Perempuan, Feminisme Liberal

1. PENDAHULUAN

Dinamika relasi antara pria dan wanita tetap menjadi isu yang tak kunjung terselesaikan. Hingga kini, hak-hak kaum wanita masih belum sepenuhnya terwujud, terutama dalam masyarakat yang menganut sistem patriarki. Sistem ini menempatkan pria pada posisi yang lebih tinggi dibanding wanita. Budaya patriarki, yang diwariskan dari generasi ke generasi, telah menciptakan perbedaan mencolok dalam perilaku, status, dan otoritas antara pria dan wanita di masyarakat. Perbedaan ini kemudian berkembang menjadi hierarki gender yang terstruktur. Pengaruh patriarki terlihat jelas di berbagai bidang kehidupan. Dalam ranah politik, pria cenderung mendominasi posisi kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Secara ekonomi, mereka memiliki kendali lebih besar atas sumber daya dan properti. Norma sosial yang berlaku umumnya lebih menguntungkan pria dan membatasi peran wanita. Akibatnya, wanita memiliki akses yang lebih terbatas di sektor publik dibandingkan pria. Bahkan dalam lingkup keluarga, pria masih dianggap sebagai kepala rumah tangga dan pemegang keputusan utama.

Menurut Murniati, seperti yang dikutip oleh Nurcahyo (2016), budaya patriarki telah mengakibatkan sejumlah kelemahan pada kaum perempuan, antara lain: 1) Kurangnya kesadaran akan kesetaraan hak asasi mereka; 2) Kesulitan mengatasi rasa malu dan takut berbuat salah; 3) Hambatan dalam berpikir logis dan jernih, yang berdampak pada pengambilan keputusan; 4) Beban pekerjaan rumah tangga yang berat; 5) Kecenderungan untuk terlalu mempertimbangkan faktor keluarga atau tradisi dalam berorganisasi; 6) Kecenderungan untuk terlalu mempertimbangkan kesamaan agama; 7) Kecenderungan untuk terlalu mempertimbangkan faktor ekonomi; 8) Kesulitan dalam menerima dan merebut kekuasaan, dengan kecenderungan untuk mengalah; 9) Kesulitan mengendalikan emosi, yang berdampak pada ketidakstabilan pikiran dan mudah terpengaruh; 10) Kesulitan dalam membangun



persatuan yang kuat di antara sesama perempuan, yang menyebabkan perpecahan dan kesulitan dalam menyatukan pandangan.

Budaya patriarki yang mendominasi pemikiran global juga memiliki pengaruh kuat dalam adat dan budaya Bali. Dalam struktur sosial masyarakat Bali, kaum pria mendapatkan posisi dan peran yang istimewa. Sistem pewarisan di Bali mencerminkan ketidaksetaraan ini, di mana hak waris hanya diberikan kepada anak laki-laki. Sementara itu, perempuan hanya dapat menikmati hasil warisan tanpa memiliki hak kepemilikan atasnya. Ketimpangan serupa juga terlihat dalam hal status kepemilikan anak, di mana seluruh hak jatuh ke pihak laki-laki. Praktik-praktik ini secara nyata tidak sejalan dengan prinsip-prinsip kesetaraan gender yang memperjuangkan keadilan dan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Kuatnya budaya patriarki di Bali membuat banyak beban yang harus dipikul oleh perempuan, baik dalam mengurus rumah tangga, menjalankan kewajiban untuk bermasyarakat, serta mempersiapkan dan menjalankan tradisi keagamaan, dan lain sebagainya. Perempuan Bali sudah terlalu sibuk mengemban tanggung jawab yang harus mereka jalani, sehingga cenderung terlalu lelah untuk menambah kesibukan lain.

Menurut Mulia, sebagaimana dikutip oleh Israpil (2017), tidak ada perbedaan esensial antara laki-laki dan perempuan dalam hal kapasitas untuk melakukan perubahan positif. Keduanya memiliki peran yang sama pentingnya dalam upaya menciptakan transformasi sosial dan meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan. Proses perubahan ini, menurut Mulia, harus dimulai dari tingkat individu, kemudian merambah ke lingkup keluarga, dan akhirnya ke masyarakat luas. Tujuan akhirnya adalah untuk membentuk suatu masyarakat yang beradab, di mana kesetaraan antara laki-laki dan perempuan menjadi norma yang diterima dan dipraktikkan. Untuk membebaskan kaum perempuan dari dominasi sistem patriarki, penting untuk mengubah pola pikir dan mentalitas yang cenderung menempatkan perempuan dalam posisi subordinat. Upaya untuk mengubah sistem patriarki mencakup berbagai pendekatan, termasuk pendidikan dan peningkatan kesetaraan gender, reformasi kebijakan untuk kesetaraan, pemberdayaan ekonomi perempuan, serta perubahan norma sosial dan budaya. Proses pemberdayaan kaum perempuan membutuhkan dukungan yang terstruktur dan proaktif. Langkah-langkah konkret perlu diambil, seperti menetapkan target kuantitatif untuk partisipasi perempuan dan secara aktif mendorong mereka untuk hadir dalam berbagai forum. Lebih dari sekadar kehadiran, perempuan juga perlu didorong untuk menyuarakan pendapat mereka. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk meningkatkan keterlibatan perempuan secara substansial dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan publik. Dengan demikian, penguatan posisi perempuan tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga memiliki dampak nyata dalam pengambilan keputusan dan pembentukan kebijakan.

Seiring berjalannya waktu, perempuan menunjukkan kiprahnya di berbagai sektor publik. Di dunia politik, semakin banyak perempuan yang menjabat sebagai anggota parlemen, kepala daerah, dan pejabat publik lainnya. Di bidang ekonomi, perempuan telah tumbuh menjadi seorang wirausaha dan eksekutif yang memimpin perusahaan-perusahaan besar, menciptakan lapangan pekerjaan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dunia aktivisme juga diwarnai oleh suara-suara perempuan yang memperjuangkan kesetaraan, keadilan, dan hak asasi manusia. Hal ini dibuktikan dengan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Provinsi Bali tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,082 poin, dari 0,321 menjadi 0,239. Perlu dipahami bahwa dalam konteks IKG, nilai yang lebih rendah menandakan situasi yang lebih baik. Penurunan ini mengindikasikan bahwa ketimpangan gender di Bali semakin berkurang, atau dengan kata lain, tingkat kesetaraan gender semakin meningkat. Perubahan ini menunjukkan bahwa Bali telah membuat langkah positif dalam mewujudkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi. Perbaikan dimensi pemberdayaan dipengaruhi oleh perbaikan persentase keterwakilan perempuan di legislatif



yang meningkat dari tahun sebelumnya. Persentase keterlibatan perempuan dalam parlemen di Provinsi Bali meningkat dari 16,36% menjadi 18,18% (Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2023).

Paiketan Krama Istri (PAKIS) Bali adalah organisasi perempuan adat di Bali yang bertujuan untuk memperkuat peran serta keterwakilan perempuan dalam komunitas adat Bali. Organisasi ini dibentuk oleh pemerintah adat Bali, melalui Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali sebagai tanggapan terhadap ketimpangan gender yang masih ada dalam struktur adat tradisional. PAKIS Bali memiliki struktur yang tersebar di berbagai tingkatan, mulai dari desa adat hingga tingkat provinsi. Hal ini memungkinkan mereka untuk bekerja secara efektif di berbagai lapisan masyarakat di Bali, menjangkau perempuan dari berbagai latar belakang dan kondisi sosial. Struktur yang desentralisasi ini memungkinkan PAKIS Bali untuk memahami kebutuhan spesifik perempuan di setiap tingkatan masyarakat adat. Melalui jaringan ini, PAKIS Bali dapat mengimplementasikan program-program yang disesuaikan dengan konteks lokal, tetap mempertahankan visi bersama untuk kemajuan perempuan Bali.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk menggali lebih jauh mengenai strategi yang diterapkan PAKIS Bali dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan, baik dari segi jumlah, kualitas, potensi, maupun kemampuan. Pemberdayaan perempuan ini sangat penting, baik bagi kemajuan organisasi maupun bagi perempuan itu sendiri dalam memperjuangkan aspirasi kaum mereka di berbagai bidang kehidupan. Diharapkan, keterlibatan aktif perempuan juga dapat berkontribusi secara produktif dalam proses pembangunan, sehingga mereka dapat memiliki kendali atas faktor-faktor produksi dengan berlandaskan kesetaraan yang sama dengan laki-laki. Keberhasilan pemberdayaan perempuan dapat dilihat ketika organisasi mampu merancang dan menerapkan strategi manajemen internal yang terencana dan transparan. Sehingga, peneliti akan mengangkat penelitian dengan judul “Strategi *Paiketan Krama Istri* (PAKIS) dalam Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan Adat Bali”

2. KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka akan menyajikan tinjauan terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini. Tujuan dari pembuatan kajian pustaka adalah digunakan untuk referensi dalam penyusunan hasil penelitian. Kajian pustaka bersumber dari jurnal-jurnal dan skripsi yang telah ada sebelumnya. Dalam menganalisa permasalahan ini, peneliti menggunakan tiga literatur dari penelitian sebelumnya sebagai referensi.

Literatur pertama adalah jurnal karya Ni Putu Lisa Purnama Sari, Ketut Erawan, dan Bandiyah (2018) yang berjudul “Hambatan LSM Kunti Bhakti dalam Meningkatkan Keterwakilan Perempuan di Jabatan Legislatif Kabupaten Tabanan Tahun 2014. Penelitian ini mengkaji peran LSM Kunti Bhakti dalam upaya meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Meskipun ada upaya tersebut, representasi perempuan di lembaga legislatif Kabupaten Tabanan belum mencapai target 30 %. Analisis dalam penelitian ini menggunakan Teori Feminisme Liberal dan Teori Post-Feminisme. Temuan penelitian menunjukkan bahwa LSM Kunti Bhakti berperan sebagai mitra KPU dan fokus pada pengembangan kapasitas calon legislatif perempuan. Namun, upaya ini menghadapi beberapa hambatan, pertama, kesulitan dalam meningkatkan kesadaran politik di kalangan perempuan. Kedua, hambatan dari partai politik yang cenderung memilih laki-laki daripada perempuan, yang disebabkan oleh budaya patriarki yang masih kuat di Kabupaten Tabanan, faktor biaya pencalonan, kurangnya pemahaman perempuan tentang politik, keterbatasan potensi perempuan, dan kesulitan mendapatkan izin dari keluarga untuk terjun ke politik.

Literatur kedua adalah jurnal karya Gilang Agung Septiati (2019) yang berjudul “Strategi *Women for Women International* (WFWI) dalam Pemberdayaan Perempuan di



Afghanistan. Penelitian ini berfokus pada strategi yang diterapkan oleh *Women for Women International* (WFWI) dalam upaya pemberdayaan perempuan di Afghanistan selama periode 2013 hingga 2017. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik analisis deskriptif untuk mengolah data. Teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dua aspek utama, yaitu Teori Feminisme Liberal yang digunakan untuk menganalisis dan menjelaskan bentuk-bentuk diskriminasi yang dihadapi perempuan di Afghanistan dan konsep Pengembangan Organisasi Non-Pemerintah (LSM) yang akan digunakan untuk mengkaji proses pemberdayaan perempuan di Afghanistan. Penelitian ini mengamati transformasi kehidupan perempuan Afghanistan dari yang sebelumnya terbatas pada ranah privat, menjadi lebih aktif dalam ranah publik setelah melalui proses pemberdayaan. Perubahan ini terlihat dari meningkatnya partisipasi perempuan dalam berbagai sektor publik, seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan lapangan pekerjaan.

Literatur tiga adalah jurnal karya Rizky Indarwati (2017) yang berjudul “Strategi Pelaksanaan Tim Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan di Kecamatan Samarinda Utara. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan berbagai program yang diimplementasikan oleh PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) dalam upaya meningkatkan pemberdayaan perempuan. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Hasil utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa strategi PKK dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan telah memberikan dampak positif, terutama dalam pelaksanaan 10 program kerja utama PKK. Efektivitas ini tercermin dari pendekatan strategis tim PKK yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Proses pemberdayaan yang dilakukan PKK meliputi beberapa tahapan, yaitu tahap sosialisasi, tahap fasilitasi, tahap pemetaan tempat, tahap perencanaan, dan tahap pelaksanaan. Penelitian ini juga mengidentifikasi adanya faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program, baik yang bersifat mendukung maupun menghambat. Faktor-faktor ini meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Secara keseluruhan, penelitian ini menyoroti peran penting PKK dalam memberdayakan perempuan melalui program-program yang terstruktur dan melibatkan masyarakat secara langsung.

Penelitian ini menggunakan Teori Feminisme Liberal sebagai kerangka teoritisnya. Feminisme, secara umum, merupakan gerakan perempuan yang memperjuangkan emansipasi atau kesetaraan dan keadilan hak antara perempuan dan laki-laki. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh aktivis sosialis utopis, Charles Fourier pada tahun 1837. Feminisme Liberal, sebagai salah satu aliran dalam feminisme berfokus pada pandangan yang menempatkan perempuan seharusnya memiliki kebebasan penuh dan individualitas. Aliran ini berpendapat bahwa kebebasan dan ketaraan berakar pada rasionalitas dan pemisahan antara ranah privat dan publik. Prinsip utama Feminisme Liberal, yaitu perempuan harus mempersiapkan diri untuk bersaing dengan laki-laki di dunia publik, kompetisi harus berlangsung dalam kerangka “persaingan bebas”, dan tujuan akhirnya adalah mencapai kedudukan yang setara antara perempuan dan laki-laki di masyarakat.

Mary Wollstonecraft merupakan salah satu tokoh penting dalam aliran feminisme liberal. Dalam karyanya “*A Vindication of the Rights of Woman*” (1792), Wollstonecraft mengemukakan argumen yang berpendapat bahwa perempuan seharusnya memiliki hak-hak yang setara dengan laki-laki, khususnya dalam hal pendidikan dan kesempatan kerja. Diskriminasi terhadap perempuan adalah hasil dari kurangnya pendidikan dan pengetahuan dan bahwa perempuan harus diperlakukan sebagai individu rasional yang setara dengan laki-laki. Wollstonecraft menekankan pentingnya pendidikan untuk mempersiapkan perempuan untuk peran publik dan pribadi yang lebih baik. Di sisi lain, John Stuart Mill dalam karyanya “*The Subjection of Women*” (1869) berargumen bahwa perempuan harus memiliki hak yang sama dengan laki-laki, termasuk hak pilih dan kesempatan di tempat kerja. Ia mengkritik sistem



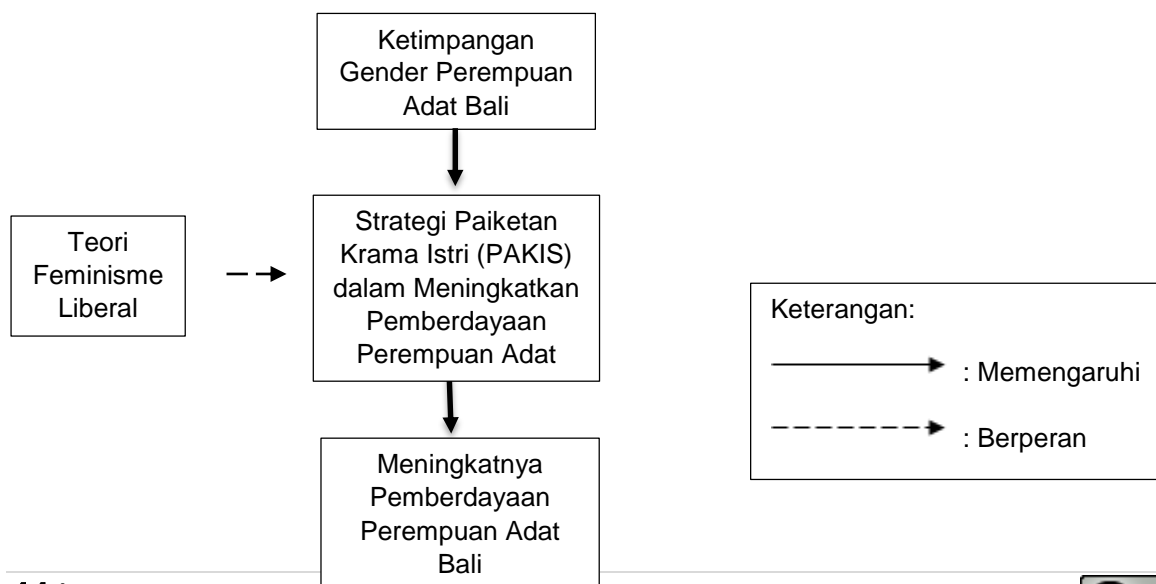
patriarkal yang menghambat kebebasan dan kesetaraan perempuan. Mill berpendapat bahwa kesetaraan gender akan menghasilkan masyarakat yang lebih adil dan efisien, dan bahwa hak-hak perempuan harus diakui sebagai hak dasar manusia (Sari, 2018).

Menurut pandangan feminisme liberal, akses untuk berpartisipasi dalam ruang publik merupakan faktor krusial dalam upaya meningkatkan status perempuan. Aliran ini berpendapat bahwa perempuan, sama seperti halnya laki-laki mampu untuk mengembangkan kapasitas intelektual dan meningkatkan kualitas moral. Mill maupun Wollstonecraft berkontribusi secara signifikan pada dasar-dasar feminisme liberal, meskipun dari perspektif berbeda. Mill dengan latar belakang menekankan manfaat kesetaraan gender untuk kesejahteraan umum, sementara Wollstonecraft fokus pada rasionalitas dan pendidikan, menekankan pentingnya hak-hak sipil dan pendidikan yang setara untuk pembebasan perempuan.

Feminisme liberal berupaya untuk meningkatkan kesadaran perempuan akan posisi mereka sebagai kelompok yang termarginalisasi. Gerakan ini mengkritisi tentang peran yang selama ini dilakukan perempuan pada sektor domestik merupakan hal yang tidak produktif dan menempatkan perempuan pada posisi subordinat. Keberhasilan feminisme liberal didukung oleh budaya Amerika yang materialistis dan individualis. Akibatnya perempuan terdorong untuk berkarir di luar rumah, berkarir dengan bebas, mencapai kemandirian ekonomi dan tidak tergantung pada laki-laki. Dasar pemikiran teori ini bertumpu pada kebebasan dan kesetaraan rasional. Mereka berpendapat bahwa perempuan memiliki kapasitas yang setara dengan laki-laki. Namun, permasalahannya terhambat oleh kebijakan negara yang bias gender. Perjuangan feminisme liberal berkembang seiring berjalannya waktu. Pada abad ke-18 muncul tuntutan agar perempuan mendapatkan kesetaraan pendidikan, pada abad ke-19 banyak upaya memperjuangkan hak-hak sipil dan ekonomi bagi perempuan, dan pada abad ke-20 pembentukan organisasi-organisasi perempuan untuk melawan diskriminasi seksual di berbagai bidang (politik, sosial, ekonomi, maupun personal) (Retnadi, 2017).

Feminisme liberal sebagai acuan PAKIS Bali agar perempuan tidak berada di bawah bayang-bayang laki-laki terus menerus, perempuan dengan bebas mengekspresikan potensi mereka di segala bidang. Seperti feminisme liberal menekankan pentingnya pendidikan dan kesempatan yang setara, PAKIS Bali juga memiliki strategi untuk memberdayakan perempuan Bali melalui program-program yang dibuatnya. PAKIS Bali dapat mengembangkan strategi yang lebih terstruktur dan efektif untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan adat Bali, membawa mereka ke arah kesetaraan hak dan kesempatan dalam berbagai aspek kehidupan.

Bagaimana alur pikir peneliti dalam menganalisis permasalahan penelitian yang kemudian dihubungkan dengan teori yang digunakan penelitian. Berikut ini adalah alur berpikir yang akan digunakan oleh peneliti sebagaimana tertulis dalam bagan di bawah ini:





Dampak patriarki terhadap gender sangat signifikan. Perempuan adat Bali sering kali mengalami diskriminasi, pembatasan hak, dan kesempatan yang terbatas. Hal ini mengakibatkan terjadinya ketimpangan gender. Upaya untuk mengubah sistem patriarki ini mencakup berbagai pendekatan. Salah satunya yang dilakukan oleh *Paiketan Krama Istri* (PAKIS) Provinsi Bali berfokus pada pembedayaan perempuan Bali melalui program-program pendidikan, pelatihan, dan peningkatan kesadaran akan hak-hak perempuan. Feminisme liberal sering mengadvokasi perubahan kebijakan untuk mencapai kesetaraan gender. Sejalan dengan ini, PAKIS Bali terlibat dalam upaya untuk mengubah praktik-praktik yang membatasi partisipasi perempuan, berusaha untuk menciptakan ruang yang lebih inklusif dalam struktur adat Bali. Meskipun ada keselarasan dengan feminisme liberal, PAKIS Bali harus beroperasi dalam konteks budaya Bali yang unik. Mereka perlu menyeimbangkan tujuan kesetaraan gender dengan menghormati tradisi dan nilai-nilai adat Bali.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif sebagai metode utama. Data utama dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer, yang mencakup pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan catatan lapangan, serta sumber data sekunder yang meliputi studi kepustakaan, dokumentasi, buku, majalah, dan arsip yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian ini menggunakan metode pemilihan unit analisis secara *purposive* atau dengan pertimbangan tertentu yang disengaja dan akan difokuskan pada *Paiketan Krama Istri* (PAKIS) Provinsi Bali.

Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti akan berusaha mencatat informasi, menyusunnya dalam uraian terperinci, dan kemudian mereduksi data dengan memilih poin-poin utama yang relevan dengan tema penelitian. Kesimpulan akan ditarik dari seluruh data yang diperoleh. Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *snowball sampling*, yang dimulai dari beberapa individu dan kemudian berkembang berdasarkan hubungan antar responden (Sugiyono, 2017).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Paiketan Krama Istri (PAKIS) Bali

Majelis Desa Adat Provinsi Bali memperkenalkan organisasi adat khusus perempuan pertamanya, yaitu PAKIS Bali atau *Paiketan Krama Istri*. Organisasi ini menjadi pelopor dalam mewadahi kepentingan kaum perempuan dalam konteks adat di Provinsi Bali. PAKIS Bali di bawah kepemimpinan Manggala Utama Paiketan Krama Istri, Ny. Putri Suastini Koster dilantik pada 17 September 2020. PAKIS merupakan organisasi di bawah naungan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali. PAKIS Bali beranggotakan istri para pejabat Pemajuan Masyarakat Adat (PMA) Provinsi Bali dan istri pengurus desa adat dari berbagai wilayah di Bali. Organisasi ini memiliki peran penting dalam mendukung berbagai program yang diinisiasi oleh desa adat. sejalan dengan visi dan misi Provinsi Bali di bawah kepemimpinan Gubernur Bali Wayan Koster, yang dikenal dengan slogan *Nangun Sat Kerthi Loka Bali*, PAKIS Bali turut berkontribusi dalam upaya memajukan kebudayaan Bali. Hal ini diwujudkan melalui upaya peningkatan perlindungan, pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan nilai-nilai adat, agama, tradisi, seni, dan budaya masyarakat Bali.

PAKIS Bali berada di bawah naungan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, MDA Provinsi Bali adalah lembaga yang menaungi desa adat di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan secara berjenjang. MDA memiliki tugas dan wewenang dalam menjalankan adat istiadat yang bersumber dari agama Hindu dan kearifan lokal. Fungsi MDA meliputi pemberian nasihat, pertimbangan, pembinaan, penafsiran, serta pengambilan



keputusan terkait adat, tradisi, budaya, sosial-religius, kearifan lokal, hukum adat, dan ekonomi adat. Di Provinsi Bali, terdapat dua jenis desa yang membedakan daerah ini dari wilayah lainnya, yaitu desa adat dan desa dinas. Desa adat, yang dikenal sebagai Desa Pakraman berdasarkan Perda Provinsi Bali No. 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman, adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki tradisi dan tata krama pergaulan hidup umat Hindu yang diwariskan secara turun-temurun. Desa Pakraman dipimpin oleh Jro Bendesa. Di sisi lain, desa dinas adalah desa yang menjalankan fungsi administrasi pemerintahan sehari-hari, serupa dengan desa-desa lain di luar Bali. Desa dinas dipimpin oleh seorang kepala desa, yang di Bali disebut *Perbekel* (PA Noak, 2016).

Keberadaan PAKIS Bali dalam kontribusinya untuk masyarakat, bersinergi dengan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Perempuan (TP-PKK) untuk mensosialisasikan program-program Provinsi Bali. Dalam struktur organisasi di tingkat desa, dua kelompok perempuan memiliki peran yang telah ditetapkan dengan jelas. Di satu sisi, TP-PKK dipimpin oleh istri kepala desa. Di sisi lain, PAKIS Bali diketuai oleh istri *jro bendesa*, yang merupakan pemimpin adat desa. Pengaturan ini mencerminkan integrasi antara struktur pemerintahan formal dan sistem adat dalam masyarakat Bali. Lebih lanjut, PAKIS Bali telah merancang berbagai program kerja yang bertujuan untuk mendukung, memberdayakan dan memperkuat kemampuan krama istri (warga perempuan) dalam menjalankan *swadharma* (kewajiban). Dengan demikian, krama istri turut berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga pelestarian adat, tradisi, dan budaya di desa adat.

Strategi Paiketan Krama Istri (PAKIS) Bali

PAKIS Bali dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan mencanangkan berbagai program, seperti pendidikan, pelatihan, dan advokasi hak-hak perempuan yang tentunya masih dalam konteks adat Bali. Persepsi dan praktik tradisional mengenai sistem patriarkal yang telah lama mengakar dalam masyarakat Bali merupakan sebuah tantangan yang harus dihadapi oleh PAKIS Bali. Dalam melaksanakan program-program pemberdayaan perempuan, organisasi ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk tokoh adat dan pemerintah Provinsi Bali.

Meski baru beroperasi selama empat tahun, PAKIS Bali telah menunjukkan kemampuannya dalam merancang program-program yang efektif untuk mendukung masyarakat Bali. Salah satu inisiatif utama mereka dimulai pada tahun 2021, berfokus pada pelestarian seni dan budaya Bali melalui kampanye di berbagai media. Program unggulan mereka adalah pelatihan etika berbusana adat dan tata rias tradisional Bali. Hingga kini, program ini telah diimplementasikan di 18 desa adat di Bali, bekerja sama dengan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Agung. Peserta pelatihan ini beragam, mulai dari warga perempuan di desa adat, pemilik salon, hingga anggota karang taruna (*yowana*). Tujuan utama dari pelatihan ini adalah agar peserta dapat langsung menerapkan keterampilan yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus berperan dalam melestarikan budaya Bali secara berkelanjutan. Melalui upaya ini, PAKIS Bali berharap dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya meneruskan tradisi adat Bali.

PAKIS Bali melanjutkan upayanya dalam pelestarian budaya pada tahun 2022. Organisasi ini mengadakan sesi pelatihan lanjutan yang berfokus pada etika berbusana dan tata rias adat di Bali. Kali ini, program tersebut memiliki tujuan khusus untuk menggali lebih dalam tentang adat dan tradisi yang khas di setiap kabupaten dan kota di Bali. Pelatihan ini menitikberatkan pada dua jenis busana adat Bali, yaitu *Payas Utama dan Payas Madya*. Melalui pendekatan yang lebih spesifik ini, PAKIS Bali berusaha untuk melestarikan keunikan budaya dari berbagai daerah di Bali, sekaligus memastikan bahwa pengetahuan tentang busana adat yang lebih formal dan semi-formal ini tetap terjaga. Menurut Ny. Putra Suastini Koster, seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan dan inovasi baru dalam tata rias dan busana adat Bali yang cenderung menyimpang dari aturan tradisional. Menanggapi fenomena ini, PAKIS



Bali menjalin kerja sama dengan LKP Agung untuk mengadakan serangkaian pelatihan khusus. Tujuan utama dari pelatihan ini adalah untuk mempertahankan dan melestarikan pakem atau standar tradisional dari *payas* Bali. Yang menarik, pelatihan ini tidak hanya berfokus pada satu standar umum, tetapi juga memperhatikan ciri khas unik dari masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Bali. Dengan demikian, PAKIS Bali berupaya menjaga keaslian dan keberagaman busana adat Bali di tengah arus modernisasi. Dengan pelatihan ini, diharapkan dapat bermanfaat untuk diri perempuan itu sendiri maupun ke depannya akan memunculkan minat perempuan untuk mendalami tata rias dan busana. Upaya pelestarian dan pelatihan ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga warisan budaya, tetapi juga memiliki manfaat ekonomi. Keterampilan dalam tata rias dan busana adat Bali yang diperoleh melalui pelatihan ini berpotensi menjadi sumber pendapatan tambahan bagi peserta. Dengan demikian, program ini diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga-keluarga di Bali.

PAKIS Bali memperluas upaya pelestarian budayanya di luar pelatihan tata busana dan tata rias. Organisasi ini juga mengadakan program-program edukasi dalam format daring, khususnya melalui webinar. Salah satu topik yang diangkat dalam webinar tersebut adalah diskusi mengenai perkembangan dan fenomena tarian Rejang, sebuah tarian tradisional Bali yang memiliki nilai sakral. Tari Rejang di Bali termasuk tarian sakral yang secara khusus dipersembahkan kepada para dewa dalam upacara keagamaan di pura. Tarian ini biasanya ditarikan oleh kaum perempuan sebagai wujud penghormatan spiritual kepada leluhur. Belakangan ini, terjadi peningkatan dalam variasi Tari Rejang yang muncul di masyarakat. Menyikapi hal ini, ada harapan agar tarian-tarian baru tersebut tetap mematuhi pakem serta selaras dengan nilai dan norma keagamaan yang berlaku di Bali. Sebagai organisasi yang berakar pada adat istiadat, PAKIS Bali mengambil peran penting dalam upaya "mengajegkan" atau melestarikan berbagai aspek kebudayaan Bali. Fokus mereka tidak hanya pada seni tari, tetapi juga mencakup adat istiadat, tradisi, dan budaya Bali secara keseluruhan. Tujuan utama mereka adalah memastikan bahwa setiap elemen budaya ini tetap dijaga keasliannya dan sesuai dengan pakem yang telah ada sejak lama. Program ini bertujuan untuk memperkuat peran dan identitas perempuan dalam konteks budaya Bali. PAKIS Bali berupaya untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman perempuan Bali akan pentingnya menjaga warisan budaya leluhur.

Selanjutnya program "*Tresna lan Punia*" yang artinya cinta kasih yang diwujudkan melalui tindakan memberi atau berbuat baik kepada orang lain, mencerminkan komitmen PAKIS Bali dalam pemberdayaan perempuan. *Tresna lan Punia* sebagai bentuk perhatian PAKIS Bali terhadap masyarakat untuk membangun masyarakat dengan menyeimbangkan pemeliharaan alam. Program ini dilaksanakan dengan penyerahan bibit sayuran, buah, dan bantuan lainnya yang dibagikan kepada masyarakat kurang mampu. Inisiatif ini memiliki dua tujuan utama, yaitu meningkatkan ketahanan pangan dan mendukung ekonomi masyarakat Bali. Programnya melibatkan penanaman pohon di pekarangan rumah warga. Setiap pohon yang ditanam tidak hanya sekedar ditanam, tetapi juga diatur penataannya dan dirawat dengan baik. Manfaat dari program ini menjadi sangat terasa bagi pemilik rumah, terutama ketika terjadi kenaikan harga bahan pokok dan kebutuhan sehari-hari. Pohon-pohon yang ditanam dapat menghasilkan bahan pangan yang bisa dikonsumsi langsung atau bahkan dijual, sehingga membantu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga dan potensial menjadi sumber pendapatan tambahan. Program ini mendorong para perempuan, terutama ibu rumah tangga, untuk lebih berdaya dalam menghadapi tantangan ekonomi. Perempuan yang sebelumnya berperan sebagai konsumen, kini mereka menjadi produsen untuk konsumsi sendiri maupun untuk dijual, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan keluarga dan perempuan itu sendiri.



PAKIS Bali telah membuktikan kemampuannya dalam meningkatkan ketahanan sosial, adat, dan budaya di kalangan masyarakat desa adat. Hal ini dicapai melalui pemberdayaan krama istri atau kaum perempuan. Selain itu, organisasi ini juga berkontribusi dalam membangun sistem ekonomi adat yang kuat dan mandiri, yang pada gilirannya turut memperkokoh perekonomian nasional. Kehadiran PAKIS Bali telah berhasil mengangkat posisi perempuan sebagai subjek aktif dalam pembangunan. Ini menegaskan pentingnya peran perempuan dalam proses pembangunan secara umum, dan khususnya peran krama istri dalam menjaga keberlangsungan adat di Bali. Kontribusi kaum perempuan ini telah berlangsung sejak lama dan terus berlanjut hingga saat ini, menunjukkan konsistensi peran sosial mereka dalam melestarikan tradisi Bali.

Keterkaitan Teori Feminisme Liberal dengan Strategi PAKIS dalam Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan Adat Bali

Di antara berbagai aliran dalam gerakan feminisme, feminisme liberal menonjol sebagai paham yang mengutamakan kesetaraan hak dan peluang bagi kaum wanita. Aliran ini berfokus pada upaya mewujudkan keadilan gender dalam berbagai aspek kehidupan, dengan menekankan pentingnya memberikan akses yang sama kepada perempuan dalam bidang-bidang yang sebelumnya didominasi oleh laki-laki. Pendekatan feminisme liberal berusaha untuk mengintegrasikan perempuan ke dalam struktur masyarakat, tanpa mengubah sistem secara radikal. PAKIS Bali dalam menjalankan program-programnya sebagai strategi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan, menunjukkan karakteristik yang sejalan dengan prinsip feminisme liberal.

PAKIS Bali berupaya meningkatkan representasi dan partisipasi perempuan dalam struktur adat Bali, mirip dengan fokus feminisme liberal pada integrasi perempuan ke dalam institusi. Organisasi ini tidak berusaha untuk menghapuskan sistem adat Bali, melainkan bekerja untuk memperluas peran perempuan di bidang adat, tradisi, budaya, sosial religius, kearifan lokal, hukum adat dan ekonomi adat. PAKIS Bali fokus pada pemberdayaan perempuan melalui program-program yang dijelaskan sebelumnya, yaitu program pelatihan tata rias dan tata busana, sosialisasi pelestarian Tari Rejang, dan program “*Tresna lan Punia*”. Melalui program tata rias dan tata busana diharapkan mampu mengembangkan keterampilan perempuan, nantinya akan memfasilitasi perempuan pada pengembangan jaringan usaha perempuan dan tentunya perempuan akan mampu memiliki kemandirian ekonomi untuk mencapai kesetaraan gender. Selain itu dengan pelestarian Tari Rejang menunjukkan strategi PAKIS Bali dalam memberdayakan perempuan melalui jalur pelestarian budaya. Ini mencerminkan keyakinan bahwa dengan pengetahuan dan keterampilan yang tepat, perempuan dapat berpartisipasi secara setara di masyarakat. PAKIS Bali dalam menjalankan program pemberdayaan perempuan dalam tujuan kesetaraan gender selaras dengan penghormatan terhadap tradisi dan nilai-nilai adat di Bali. PAKIS Bali memastikan bahwa pemberdayaan yang dilakukan mewakili kepentingan semua perempuan adat Bali, dari golongan kelas menengah hingga yang paling terpinggirkan.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan dan analisa penelitian, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Paiketan Krama Istri (PAKIS) Provinsi Bali sebagai organisasi perempuan adat, menerapkan strategi pemberdayaan yang sejalan dengan prinsip-prinsip feminisme liberal. Meskipun tidak secara eksplisit mengidentifikasi diri dengan feminisme liberal, pendekatan PAKIS Bali menunjukkan upaya untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam struktur adat, tanpa berusaha menghapus sistem yang ada.

Program-program PAKIS Bali, seperti pelatihan tata rias dan tata busana, pelestarian Tari Rejang, dan pemberdayaan ekonomi, mencerminkan keyakinan feminisme liberal bahwa



dengan peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemandirian ekonomi, perempuan dapat berpartisipasi secara setara dalam masyarakat. Namun, PAKIS Bali juga berusaha menyeimbangkan tujuan kesetaraan gender dengan penghormatan terhadap tradisi dan nilai-nilai adat Bali. Organisasi ini memastikan program pemberdayaan dapat mewakili kepentingan semua perempuan adat, mengadaptasi prinsip feminisme liberal ke dalam konteks budaya lokal yang unik.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Akbari, M. S., Mustanir, A., & Jabbar, A. (2023). "Strategi Pemerintah Desa Berbasis Pemberdayaan Perempuan Dalam Peningkatan Pendapatan Masyarakat di UMKM". *Jurnal Dinamika Pemerintahan*, 6(2), 180-196.
- Ayunda, L & Mahardika, A. (2022). "Strategi Manajemen Organisasi Dalam Upaya Meningkatkan Keaktifan Kader Perempuan di DPD Golkar Tebing Tinggi". *Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan*, 2(1), 1-12.
- Bali Post. (2021). *PAKIS Bali Perkuat Kemampuan Krama Istri Desa Adat*. Diambil kembali dari https://www.balipost.com/news/2021/01/16/169100/Pakis-Bali-Perkuat-Kemampuan-Krama...html#google_vignette
- Indrawati, R. (2017). "Strategi Pelaksanaan Tim Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan di Kecamatan Samarinda Utara". *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 861-872.
- Laksara.id. (2022). *PAKIS Bali Sosialisasikan Tugas dan Tujuan Organisasi Adat Perempuan di Bali Secara Berkelanjutan*. Diambil kembali dari <https://laksara.id/2022/12/21/pakis-bali-sosialisasikan-tugas-dan-tujuan-organisasi-adat-perempuan-di-bali-secara-berkelanjutan/>
- Pemerintah Provinsi Bali. (2023). *Dua Tahun Kinerja PAKIS Bali, Krama Istri Bali Turut Bergerak Lestarkan Tata-Titi Kehidupan Bali Berdasarkan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Denpasar*. Diambil kembali dari <https://www.baliprov.go.id/web/dua-tahun-kinerja-pakis-bali-krama-istri-bali-turut-bergerak-lestarikan-tata-titi-kehidupan-bali-berdasarkan-nilai-nilai-kearifan-lokal-denpasar/>
- Pathony, T. (2019). "Proses Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kabupaten Subang". *Internasional Journal of Demos*, 1(2), 262-289.
- Retnani, S. D. (2017). "Feminisme Dalam Perkembangan Aliran Pemikiran dan Hukum di Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum Prinsipium*, 1(1), 95-109.
- Sari, Erawan K.P, & Bandiyah. (2018). "Hambatan LSM Kunti Bhakti Dalam Meningkatkan Keterwakilan Perempuan di Jabatan Legislatif Kabupaten Tabanan Tahun 2014". *Jurnal Nawala Politika*, 1(1). 1-11.
- Septiadi, G. A. (2019). "Strategi Women for Women Internasional (WFWI) Dalam Pemberdayaan Perempuan di Afghanistan". *Frequency of Internasional Relations*, 1(1), 122-157.
- Suprpta, I. N. (2020). "Eksistensi Perempuan Buleleng di Kancan Politik Lokal Suatu Perjuangan Menuju Kesetaraan Gender". *Locus Majalah Ilmiah FISIP*, 12(1), 70-83.
- Triani, A. W. & Tjahjono, T. (2023). "Mitos Kecantikan Dalam Kumpulan Cerita Kitab Kawin Karya Laksmi Pamuntjak (Kajian Feminisme Liberal Naomi Wolf)". *BAPALA*, 10(2), 71-83.
- Utaminingsih, Sabariman, H & Riniwati, H. (2020). "Representasi Feminisme Pada Kepemimpinan Perempuan di Madura". *Kafa'ah Journal*, 10(2), 173-186.



Widiani, G. A. E & Anom, I. G. N. (2023). "Peran Paiketan Krama Istri (PAKIS) Dalam Pola Kepemimpinan Desa Adat Berbasis Gender di Desa Adat Kesiman". *Jurnal Hukum Mahasiswa*, 3(2), 959-976.

Zahra, E. F. (2020). "Kepemimpinan Perempuan di Balik Bayang-Bayang Patriarki (Studi Kasus Terhadap Perempuan Dalam Ranah Politik Lokal)". *Internasional Journal of D*